UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Yuridis Kewajiban Memiliki Hak Guna Usaha Bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015
Ashima Rohana Naibaho, Rafael Edy Bosko, S.H., M.IL.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badan Pusat Statistik. *Statistik Tanaman Perkebunan Tahunan Indonesia Tahun 2024*. Badan Pusat Statistik, 2025.

Corley, R.H.V. dan P.B. Tinker. *The Palm Oil.* Blackwell Publishing Company, 2003.

Hakim, Lukman. *Asas-Asas hukum Pidana*. Deepublish, 2019.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum.* Djamban, 2008.

Jelsma, Idsert, Ken Giller, dan Thomas Fairhurst. *Smallholder Oil Palm Production System in Indonesia: Lessons from the NESP Ophir Project*. Wageningen University, 2009.

Kartodirdjo, Sartono dan Djoko Suryo. *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi.* Aditya Media, 1991.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Bumi Aksara, 2012.

Pahan, Iyung. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir.* Penebar Swadaya, 2011.

Prasetyo, Teguh, Kadarwati Budihardjo, dan Purwadi. *Hukum dan Undang-Undang Perkebunan*, 2013.

Poku, Kwasi. *Small-scale Palm Oil Processing in Africa.* FAO Agricultural Services Bulletin 148. Rome: Food and Agricultural Organization of the United Nations, 2002.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif.* PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013.

Soedomo, Sudarsono, et al. *Tata Kelola Perkebunan Sawit di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat.* Forci Development, 2018.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Yuridis Kewajiban Memiliki Hak Guna Usaha Bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015
Ashima Rohana Naibaho, Rafael Edy Bosko, S.H., M.IL.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Raja Grafindo, 2011.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research).* Sinar Grafika, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Alfabeta, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75).

Undang-Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Yuridis Kewajiban Memiliki Hak Guna Usaha Bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015
Ashima Rohana Naibaho, Rafael Edy Bosko, S.H., M.IL.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202).

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Nomor 9/SE-HT.01/VII/2024 tentang Percepatan Pemberian Hak Guna Usaha Bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.

Surat Edaran Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor 455/SE/PI.400/E/06/2024.

Undang-Undang Dasar India.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015.

D. Jurnal

Arifin, Muhamad Zainal, "Keabsahan Hak Guna Usaha yang Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (Maret 2025): 3111-3115.

Budidarsono, S, A. Susanti, dan A. Zoomers. "Oil Palm Plantations in Indonesia: The Implications for Migration, Settlement/Resettlement and Local Economic Development." dalam *Biofuels Economy, Environment and Sustainability*, diedit oleh Zhen Fang. Intech. 2013.

Carolina, Aisyah Syafa, Fatmie Utraie, dan Bambang Daru Nugroho. "Urgensi Pembatasan Hak Guna Usaha Perkebunan untuk Badan Hukum sebagai Upaya Mengatasi Ketimpangan Lahan." *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* 2, no. 3 (Maret, 2023): 313.

Copenhaver, Ross D., "The Curative Act and the Probate Code," *Wyoming Law Journal* 3, no. 4 (December 2019) 205-206.

Darmawan, Arya Hadi, et. al., "Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 17, no. 2 (2019): 309-310.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Yuridis Kewajiban Memiliki Hak Guna Usaha Bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015
Ashima Rohana Naibaho, Rafael Edy Bosko, S.H., M.IL.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Driedgar, E.A., "Statutes: Retroactive Retrospective Reflections," *Canadian Bar Review* 56, no. 2 (June 1978) 268.

Erlis, "Kepastian Hukum Perolehan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit dalam Upaya Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif di Kabupaten Pasaman Barat." *Unes Journal of Swara Justisia* 2, no. 2 (Juli 2018): 178-180.

Guttman, Daniel, "Hislop v. Canada: A Retroactive Look." *The Supreme Court Law Review* 42, no. 19 (2008): 547-550.

Hoshour, Cathy A., "Resettlement and the Politization of Ethnicity in Indonesia." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 153, no. 4 (1997): 558-559.

Nilamsari, Natalina, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (Juni 2014): 178.

Oloan, Nur, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH," *Jurnal Warta*, no. 50 (Oktober 2016): 3-4.

Parwati, Ni Ketut Sri dan Sudjito, "Politik Hukum Pemberian Hak Guna Usaha setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007." *Mimbar Hukum* 2, no. 1 (Februari 2012): 143-145.

Tendean, Christovel Rezky Janes, "PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN." *Lex Crimen* 7, no. 9 (November 2018): 152-154.

Rahmadian, Faris, Arya Hadi Dharmawan, dan Rilus A. Kinseng, "Diskursus Perizinan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Studi Kasus Kabupaten Kutai Kartanegara." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 22, no. 1 (Maret 2020): 120-121.

Roestamy, Martin, Sudiman Sihotang, dan Davi Aulia Indra Giffari, "NONRETROACTIVE PRINCIPLE FOR BUSINESS GUARANTEES IN EXISTING PLANTATION COMPANIES FOLLOWING THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER: 138/PUU-XIII/2015." *Islam Scientific Journal* 8, no. 2 (Juli 2025): 205.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Yuridis Kewajiban Memiliki Hak Guna Usaha Bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015
Ashima Rohana Naibaho, Rafael Edy Bosko, S.H., M.IL.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Rahmawati, Sofia, "Analisis Yuridis Tanah Terlantar Berstatus Hak Guna Usaha." *Prosiding Seminar Nasional Instiper* 1(1):12.

Salsabila, Dara, "Degradasi Kekuatan Hak Guna Usaha untuk Perkebunan Kelapa Sawit," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 14, no. 2 (November 2024): 163-164.

Sayyed, Saniya, "THE DOCTRINE OF RETROSPECTIVITY INSTATUTORY INTERPRETATION: A JUDICIAL PERSPECTIVE." *Indian Journal of Law and Legal Research* 8, no. 1 (Maret 2026): 7890.

E. Karya Ilmiah

Chabibah, Nur. "Kepastian Hukum Status Perkebunan Kelapa Sawit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015." Bachelor Thesis, Universitas Jember, 2019.

F. Internet

Bangun, Derom. "Indonesia Palm Oil Industry." *The National Institute of Oil Seed*, 22 Mei 2026. http://www.oilseed.org/pdf/am_2006_materials/Bangun_Text.pdf.

Bina Desa. "Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Sebagian Gugatan Atas UU Perkebunan." diakses 25 September 2025. https://binadesa.org/berita/putusan-mahkamah-konstitusi-mengabulkan-sebagian-gugatan-takp/.

Casemine. "Director General Of Foreign Trade v. Kanak Exports: Supreme Court Establishes Principles on EXIM Policy Amendments." diakses 20 Mei 2026. https://www.casemine.com/commentary/in/director-general-of-foreign-trade-v.-kanak-exports:-supreme-court-establishes-principles-on-exim-policy-amendments/view.

Diandra, Zalika. "Fluktuasi Ekspor Minyak Kelapa Sawit 5 Tahun Terakhir." *Goodstats*, 12 Agustus 2025. https://data.goodstats.id/statistic/fluktuasi-ekspor-minyak-kelapa-sawit-5-tahun-terakhir-7UHdO.

Eco Nusantara. "Verification of Complaints Against PT Mamuang, PT Lestari Tani Teladan and PT Agro Nusa Abadi Raised by Friends of the Earth–US and WALHI: Final Report." 28 September 2023. https://www.astra-agro.co.id/wp-content/uploads/2023/11/2023-

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Yuridis Kewajiban Memiliki Hak Guna Usaha Bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015
Ashima Rohana Naibaho, Rafael Edy Bosko, S.H., M.IL.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

10-30-ENS-Final-Report-AAL-Cases-in-C-Sulawesi-ENG.pdf.

FJP Law Offices. "Retroactive Principle in Indonesia." 7 Mei 2026. https://fjp-law.com/retroactive-principle-in-indonesia/.

Maulana, Atlas. "Menteri Nusron tegaskan penyelesaian HGU dan pemetaan tanah jadi prioritas." 26 April 2025. https://sumbar.antaranews.com/berita/675505/menteri-nusron-tegaskan-penyelesaian-hgu-dan-pemetaan-tanah-jadi-prioritas.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. "Laporan Akhir Analisa dan Evaluasi Hukum atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan." 17 April 2026. https://bphn.go.id/data/documents/AE UU NO 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan 2011.pdf.

Kementerian Keuangan RI. "Industri Kelapa Sawit Berperan Strategis bagi Perekonomian Indonesia. 21 November 2025. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Peran-Strategis-Industri-Kelapa-Sawit

Konsorsium Pembaruan Agraria. "Ekspansi Lahan Sawit Berisiko Konflik Agraria." 2 Januari 2025. https://www.kpa.or.id/2025/01/ekspansi-lahan-sawit-berisiko-konflik-agraria/.

Maulana, Atlas. "Menteri Nusron tegaskan penyelesaian HGU dan pemetaan tanah jadi prioritas." *Antara Sumbar*, 26 April 2025. https://sumbar.antaranews.com/berita/675505/menteri-nusron-tegaskan-penyelesaian-hgu-dan-pemetaan-tanah-jadi-prioritas.

SCC Online. "Clarifications, Amandements, Explanations of any previous Law whether Prospective or Retrospective in Nature? Supreme Court answers." 7 Mei 2026. https://www.scconline.com/blog/post/2023/07/03/sc-answers-whether-clarifications-of-previous-law-retrospective-or-prospective-legal-news/ - :~:text=Division Bench of K,scope of the original provision.

Sulistyo, Luthfi. "537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa HGU, Menteri Nusron Sampaikan akan Ada Sanksi." *Kementerian ATR BPN RI, 25 September 2024*. https://www.atrbpn.go.id/berita/537-perusahaan-kelapa-sawit/.